

**PERBEDAAN SIKAP UNI EROPA DAN RUSIA TERHADAP DEKLARASI
KEMERDEKAAN KOSOVO TAHUN 2008**

Ali Muhammad; Bintang Alfathmi Cita

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : bintang.alfathmi.2014@fisipol.umy.ac.id

ABSTRACT

This research tries to analyze the severe issue of international security from West Balkan regional sub-complex with Regional Security Complex Theory as the theoretical approach. This study possibly will not only identify key factors and main future RSCT but also shape the idea about West Balkan as a heterogenic and conflict-risk region. With the purpose of confirming RSCT on the study of West Balkan sub-complex, the author will propose some task, including the application of 4 (four) level of RSCT to analyze the security dynamic of West Balkan, namely the relation with neighboring region and the role of global power in the region. This thesis will also analyze West Balkan as a sub-complex and security complex in the region of Europe. RSCT presented that in early 1990s Balkan became a separate RSC, proven with the overlay case. Starting with Kosovan War toward independence, Balkan transformed into a sub-complex within the security region of European Union. From the case study, the fact that the West had already acknowledged/supported Kosovan unilateral declaration in February 2008 was challenged by Russia instead. This research will also find the security complex character or the pattern of amity and enmity between EU and Russia. In short, enmity (hostility) between the two sides is more dominant than the amity (cooperation). The issue signifies a security interdependence between the Balkan and the Caucasus as a sub-complex and regional security complex of UE and post-Soviet. This is based on the security and political interest for both actors. When great powers project their power on to surrounding region and the inter-regional dynamic shows the super-complex, the case of Kosovo suits to affirm the RSCT. The main conclusion of this research is to emphasize that West Balkan maintains its characteristics, which is necessary through special and separate approach, and once again affirms that RSCT is an effective methodological mean to make the author possible to analyze the process of the regional-international politics and security in West Balkan.

Penelitian ini mencoba untuk menganalisa masalah keamanan internasional yang akut dari sub-kompleks kawasan Balkan Barat dengan *Regional Security Complex Theory* sebagai pendekatan teoritis. Studi ini memungkinkan tidak hanya mengidentifikasi unsur-unsur kunci dan fitur utama *RSCT*, tetapi juga untuk membentuk gagasan tentang Balkan Barat sebagai kawasan yang heterogen dan rentan akan konflik. Dengan tujuan untuk mengkonfirmasi *RSCT* pada studi sub-kompleks Balkan Barat, penulis akan mengajukan beberapa tugas, diantaranya adalah penerapan 4 (empat) tingkatan *RSCT* untuk menganalisa dinamika keamanan Balkan

Barat seperti hubungan kawasan dengan wilayah tetangga dan peran kekuatan global di kawasan. Tugas lain dari makalah ini adalah menganalisa Balkan Barat sebagai sub-kompleks dalam kompleks keamanan regional Eropa. *RSCT* mengemukakan bahwa pada awal tahun 1990-an tampaknya Balkan menjadi kompleks *RSC* yang terpisah, faktanya itu adalah kasus *overlay*. Dimulai dengan perang Kosovo hingga proses menuju kemerdekaan, Balkan berubah menjadi sub-kompleks dalam kompleks keamanan Uni Eropa-Eropa. Mengambil studi kasus, fakta bahwa Barat telah mengakui/mendukung deklarasi unilateral Kosovo pada bulan february 2008, justru mendapatkan pertentangan dari pihak Rusia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan karakter *security complex* atau *the pattern of amity and enmity* antara UE dan Rusia. Secara garis besar aspek *enmity* (permusuhan) antara kedua pihak jauh lebih dominan dari pada aspek *amity*-nya (kerja sama). Signifikasi dari permasalahan tersebut adalah adanya interdependensi keamanan antara Balkan dan Kaukasus sebagai sub-complex dari kompleks keamanan kawasan UE-Eropa dan pasca-Soviet. Hal ini didasarkan oleh kepentingan keamanan dan politik bagi masing-masing aktor. Ketika kekuatan besar memproyeksikan kekuatannya ke wilayah yang berdekatan dan dinamika antar wilayah mendefinisikan *super-complex*, bahwa kasus Kosovo cukup untuk menegaskan *RSCT*. Kesimpulan utama dari penelitian ini menekankan bahwa Balkan Barat mempertahankan ciri khasnya, yang memerlukan pendekatan yang terpisah dan khusus, dan sekali lagi menegaskan bahwa *RSCT* adalah alat metodologis yang efektif, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses politik regional-internasional di bidang keamanan Balkan Barat.

Keywords: *Amity; Enmity; Balkan Barat; Barat; Eropa; EU; Kaukasus; Kosovo; NATO; Rusia; Regional Security Complex (RSCT); Serbia*

Pendahuluan

Definisi dari *Regional Security Complex* berarti bahwa kompleks keamanan (dengan keterkaitan masalah keamanan yang sangat mempengaruhi proses sekuritisasi maupun desekuritisasi) terbentuk berdasarkan kawasan atau faktor kedekatan geografis. Selain itu, *RSC* dicirikan oleh pola-pola persahabatan dan permusuhan yang mengambil bentuk pola sub-global dari interdependensi keamanan. *RSC* biasanya dipengaruhi oleh faktor historis, seperti misalnya *historical antagonism*, perselisihan antarnegara atau latar belakang budaya, peradaban, dan sejarah yang sifatnya umum. Selanjutnya, pembentukan *RSC* berasal dari interaksi antara, di satu sisi, struktur anarkis dan konsekuensi keseimbangan kekuasaannya, dan di sisi lain tekanan geografis lokal. Dengan demikian, kedekatan negara memainkan peran penting dalam keamanan, menciptakan lebih banyak interaksi untuk negara-negara tetangga daripada untuk negara-negara yang terletak di wilayah yang berbeda.

Studi keamanan di kawasan Balkan sendiri sangat dipengaruhi oleh sejarah, Eropa telah mengalami perubahan struktural yang cukup menentukan kedepannya. Dalam pelbagai periode, benua ini telah mencoba sebagian besar bentuk yang bisa diambil oleh suatu kawasan: terpusat, terfragmentasi, *overlay*, dan dirinya *overlayer* bagi sebagian besar dunia. Selain itu,

telah melalui proses penggabungan dan rediferenisasi menjadi beberapa RSC. Selama Perang Dingin, Uni Soviet telah naik ke tingkat global menjadi konstitusional dunia. Dengan demikian, Rusia ditarik keluar dari Eropa, dan tidak memiliki RSC di kawasannya (karena dominasi langsung dari anggota potensial). Setelah berakhirnya Perang Dingin, Eropa telah goyah antar formasi satu, dua, atau bahkan 3 kompleks. Pada tahun-tahun pertama pasca Perang Dingin, 'OSCE' Eropa mulai terbentuk termasuk Rusia sebagai anggotanya. Akan tetapi, kemudian, semakin melayang untuk menjadi pusat RSC-nya sendiri. Kawasan Balkan untuk sementara, seolah-olah membentuk RSC yang berbeda. Perkembangan ini akhirnya tidak terwujud, dan Eropa sekarang terdiri dari dua RSC terpusat yang telah secara tegas menahan gesekan dan keseimbangan kekuatan tradisionalnya (Crombois, 2008). Kedekatan geografis dari dua kekuatan besar Eropa (UE dan Rusia) membuat penyatuan kembali kedua kompleks itu. Hal ini menjadi penting karena lansekap/dinamika keamanan Eropa menjadi khas. Monopoli dekat negara pada status keamanan dan tindakan keamanan ditantang di Eropa. Di mana terdapat banyak objek referensi dari nilai-nilai politik yang kemudian ditindaklanjuti dalam mode keamanan.

Ketika proses disintegrasi Yugoslavia menyebabkan kompleksitas permasalahan di kawasan Balkan yang tiada akhirnya. Faktanya, konflik tersebut justru mencerminkan proses perubahan dalam sistem konstitusi internasional secara keseluruhan (Weller, 2000). Hal tersebut didukung dengan adanya interaksi dan pola keamanan aktor-aktor lokal bekas negara Yugoslavia yang hingga kini masih terhubung satu sama lain, ditambah besarnya kekuatan aktor tersebut sehingga menyebabkan kawasan Balkan dengan mudahnya ditarik sebagai sub-regional ke dalam Eropa (Buzan & Waeber, 2003). Inilah barangkali yang kemudian dipahami Barry Buzan sebagai fenomena keamanan kawasan. Dalam bukunya *People, States and Fear* nampak jelas bahwa yang disebut keamanan (*security*) merupakan sebuah fenomena yang memiliki keterkaitan satu sama lain (Buzan, 1991).

Konflik Kosovo dalam kaitannya dengan proses menuju kemerdekaannya atas Yugoslavia merupakan contoh kasus yang sempurna untuk menggambarkan kompleksitas keamanan di kawasan. Mengingat Kosovo memainkan peranan penting selama hampir dua dekade terakhir di dalam permasalahan Yugoslavia pada abad ke-20 (Rogel, 2003). Di seberang lain, konflik Kosovo diandaikan sebagai arena yang begitu relevan dengan adanya empat konstelasi keamanan, diantaranya adalah kerentanan negara-negara yang berada di dalam kawasan dalam negeri, hubungan negara ke negara, interaksi wilayah dengan daerah-daerah tetangga, dan peran kekuatan besar di dalam kawasan (Pop, 2013). Permasalahan

Kosovo tidak hanya relevan untuk manajemen internasional dari konflik etno-politik, akan tetapi juga sebagai tumpahan yang dihasilkan baik dari ruang pasca-Yugoslavia (yang merupakan konsekuensi dari fitur interdependensi *RSC*) dan di luarnya, di ruang pasca Soviet (yang merupakan konsekuensi interdependensi antar-regional antara dua sub-kompleks milik dua *RSC* bersebelahan). Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan untuk kedua kalinya, kejadian tersebut menandai episode terbaru dalam pembubaran Yugoslavia. Ketika Rusia menerapkan politik konfrontatif terhadap Barat, seperti saat Rusia menentang deklarasi unilateral kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008, hubungan Rusia dan Barat semakin mengalami ketegangan. Ketegangan meningkat ketika Barat-UE mengakui kemerdekaan Kosovo. Hal tersebut yang kemudian meredefinisi aspek hubungan keamanan antara NATO - Uni Eropa, NATO – Russia, dan yang paling signifikan hubungan Uni Eropa dan Russia. Perbedaan-perbedaan ini telah mengungkap perpecahan lama yang terjadi antara Rusia dan Barat, khususnya selama pengeboman NATO terhadap Yugoslavia di tahun 1999. Sementara bagi pandangan Barat, hal ini akan menjadi sulit untuk mencapai kompromi dengan Russia yang semakin tegas dan percaya diri untuk menentang kebijakan Barat. Munculnya dinamika-dinamika baru dalam studi keamanan di Balkan didorong karena unit analisis studi ini mengalami perubahan mendasar dalam interdependensi dunia ini. Unit analisa yang sebelumnya kurang menekankan perhatiannya terhadap “fenomena besar” terkait keamanan di kawasan ini mulai saling menggugat (Winn, 2003).

Terdapat satu pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini. Yaitu mengapa terjadi perbedaan sikap Uni Eropa dan Rusia dalam merespon kemerdekaan Kosovo. Argumen utama yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah karakter *security complex* atau *the pattern of amity and enmity* antara kedua negara lebih diwarnai dan didominasi oleh aspek *enmity* (permusuhan) ketimbang aspek *amity* (kerja sama). Argumen kedua bahwa kemerdekaan Kosovo memiliki pengaruh di dalam pembentukan arsitektur keamanan regional di Eropa. Interdependensi keamanan di kawasan Balkan dan Kaukasus (sebagai bagian dari Eropa) didasarkan oleh adanya distribusi power oleh negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Perbenturan aspek *amity* dan *enmity* ini menjadi faktor penting yang menyebabkan perbedaan sikap dan perilaku kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lainnya, yang pada akhirnya memengaruhi dinamika hubungan keduanya dari waktu ke waktu.

KERANGKA TEORI

Barry Buzan berpendapat (1991) bahwa keamanan pada dasarnya adalah suatu fenomena yang relasional (*relational phenomenon*) (Stone, 2014). Oleh sebab itu, keamanan suatu negara atau beberapa negara dalam suatu kawasan tidak dapat dipahami tanpa lebih dulu memahami pola hubungan saling ketergantungan keamanan, di antara negara-negara kawasan tersebut. Dalam buku *People, States and Fear* edisi ke-2 misalnya, dalam memahami keamananan regional ini, Buzan menawarkan konsep *Security Complex*. Buzan mendefinisikan *Security Complex* sebagai:

“a group of states whose primary security concern link together sufficiently closely that their national security cannot realistically be considered apart from one another” (Buzan, 1991)

Konsep tersebut mencakup aspek persaingan maupun kerja sama diantara negara-negara terkait. Karakter *security complex* yang mencakup “*interdependence of rivalry as well as that of shared interest*” oleh Buzan diistilahkan dengan “*pattern of amity and enmity among states.*” *Amity* adalah hubungan antarnegara yang terjalin mulai dari rasa persahabatan sampai ekspektasi akan mendapatkan dukungan atau perlindungan satu sama lain. Sementara itu, Buzan menggambarkan *enmity* sebagai suatu hubungan antarnegara yang terjalin atas dasar kecurigaan dan rasa takut satu sama lain. *Pattern of amity-enmity* ini dapat muncul dan berkembang akibat berbagai isu yang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat *distribution of power* yang ada di antara negara-negara terkait. *Pattern of amity-enmity* dapat datang dari berbagai hal yang bersifat spesifik seperti sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan garis etnis tertentu, pengelompokan ideologi dan preseden historis lama baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif, serta distribusi kekuasaan di antara negara-negara atau di kawasan tertentu (Buzan, 1991).

PEMBAHASAN

Regional Security Complex dan Dinamika Keamanan di Kawasan Balkan.

Untuk memahami kompleksitas keamanan di kawasan Balkan perlu mempertimbangkan 4 (empat) tingkat analisis *Regional Security Complex Theory*, diantaranya adalah keamanan internal, hubungan antara negara-negara di kawasan, hubungan kawasan dengan wilayah tetangga dan peran kekuatan global di wilayah tersebut (Buzan & Waever, 2003). Meskipun secara geografis, wilayah Balkan tidak begitu besar, dinamika internal yang terjadi di sana

lebih disebabkan oleh faktor heterogenitas masyarakat yang menghuninya. Konsekuensinya adalah wilayah ini telah menjadi sumbernya konflik hingga masih terlihat sampai saat ini. Dalam pengertian ini, wilayah Balkan memiliki beberapa titik fokus potensial, karena kelompok etnis yang berbeda terjalin di sebagian negara-negara di dalam wilayah ini, dan masing-masing memiliki identitasnya sendiri yang dibangun melalui prisma dari potensi ancaman dari kelompok etnis lain. Dinamika keamanan antara negara-negara Balkan begitu kuat dan kontradiktif, terutama pada “segitiga” yang paling umum kita ketahui, diantaranya Kroasia-Serbia-Bosnia; tiga entitas di Bosnia; Slovenia-Serbia-Kroasia (Nelaeva & Semenov, 2016).

Sebagai hasil dari segitiga entitas yang saling terkait dan mengunci ini, setiap konflik mudah direfleksikan di sejumlah negara-negara besar. Menurut Buzan dan Waever, jika aliansi permanen terbentuk, maka yang akan terjadi adalah sebuah fenomena basis keagamaan (“Islamic arc”- Turki, Albania, Kosovo dan sabtu bagian dari Bosnia Herzegovina (Federasi Bosnia dan Herzegovina), di seberang lain, Yunani, Bulgaria, Serbia bagian dari Bosnia-Herzegovina – Republik Srpska, dan Serbia (Pejic, 2016). Buzan dan Waever menambahkan bahwa model potensi konflik di Balkan terlalu rumit dan jumlah partisipan terlampaui besar. Ketika menyangkut dampak internasional, pertanyaan tentang masa depan dari berbagai proktektorat di Bosnia dan Kosovo, tetap terbuka (Chandler, 2017). Cara di mana bangsa atau negara tertentu di dalam membangun identitas mereka dan cara kita melihat identitas dan posisi mereka dalam hubungannya dengan negara tetangga sejauh ini telah mempengaruhi dinamika keamanan di wilayah yang lebih luas.

Di satu sisi, periode pasca-Perang Dingin semi kemerdekaan di wilayah hampir mirip dengan periode antara Perang Balkan dan Perang Dunia I. Demikian pula dengan yang terakhir, ketika keseimbangan lokal sistem perimbangan kekuatan mulai terhubung ke Eropa ke arah dinamika Eropa yang lebih luas, saat itu juga keamanan Balkan dan Eropa bergabung (Pop, 2013). Pada pertengahan 1990-an, Balkan semakin ditarik ke dalam dinamika keamanan yang didorong oleh EU. Dapat dijadikan bahan diskusi apakah definisi sesungguhnya dari Balkan adalah sub-kompleks dalam RSC Eropa atau wilayah yang overlay (Durch, 2016). Hal ini biasanya menghasilkan penempatan jangka panjang oleh kekuatan bersenjata yang besar di wilayah tersebut, dan dalam penyelarasan negara-negara di bagian setempat sesuai dengan pola persaingan kekuatan besar

Jika Balkan merupakan kasus yang *overlay*, hal ini akan memanifestasikan dirinya oleh dinamika internal yang ditekan oleh kekuatan eksternal dan perdamaian di Balkan saat ini secara tidak sadar hanya dipkasakan, dan dengan demikian wilayah itu menjadi perang lagi ketika kondisi *overlay* telah dihapus. Balkan sendiri merupakan kasus *overlay* selama perang Yugoslavia (1991-1999), yang telah menunjukkan pengaruh luar biasa terhadap kekuatan besar, termasuk EU, AS, dan Rusia (Thomas, 2003). Selama periode ini sub-wilayah dilapisi oleh dinamika dari kekuatan-kekuatan besar regional. Namun, ketika tindakan dari aktor eksternal tidak begitu jelas dan tegas, pendekatan Balkan adalah dengan aktor lokal, dan tindakan aktor eksternal dipersempit dengan diwakili PBB mencoba untuk melunakkan konsekuensinya. Meskipun demikian, secara keseluruhan, disintegrasi Yugoslavia menunjukkan pengaruh luar biasa kekuatan-kekuatan besar dari pihak eksternal.

Bahkan terdapat klaim, bahwa perselisihan dan permasalahan yang terjadi mungkin dapat diselesaikan dengan cepat jika daerah itu telah diisolasi, karena dalam hal ini para aktor harus menggunakan cara dan logika politik-militer klasik, yang nantinya, akan membuat para aktor menghitung ulang skala rasionalitas dan kesempatan, bisa jadi lebih rasional dan realistis dan berusaha untuk berkompromi ketika mereka sudah tidak memiliki harapan untuk memperbaiki situasi mereka di medan perang. Akan tetapi karena masing-masing aktor utama memiliki kawan yang kuat dari luar (pihak eksternal), mereka akan terus berharap mendapatkan dukungan, dan itu membuat mereka tidak berpaling. Sebagaimana Kroasia mengharapkan dukungan dari Jerman, Serbia kepada Rusia, sedangkan Albania & Kosovo mengharapkan dukungan US/UE (Pop, 2013).

Hingga pada akhir perang Kosovo, para aktor-aktor Barat dan Uni Eropa memperkenalkan pendekatan kerja sama fungsional *sub-regional*, yaitu Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara, yang memiliki efek menyeluruh dalam memperkuat kawasan Balkan. Selanjutnya, Uni Eropa meluncurkan Proses Stabilisasi dan asosiasi (SAP), program kemitraan untuk Perdamaian NATO (PNP) dan rencana aksi keanggotaan (MAP) membuat negara-negara di kawasan itu secara konstruktif fokus dan terlibat dalam kegiatan keamanan dan Balkan akan di masukan ke dalam jalur menuju proses integrasi (Kotios, 2001). Dimulai dengan Dewan Eropa di Thessaloniki pada bulan Juni 2003, tujuan yang ditetapkan adalah untuk mengintegrasikan kawasan Balkan ke dalam organisasi Eropa dan Eropa Atlantik (Eropa, 2003). Singkatnya, melihat kapasitas interaksi dan fitur sekuritisasi di Balkan, negara-negara Balkan telah saling berhubungan di era pasca-Perang Dingin. Namun karena aktor-aktor yang kuat mengelilinginya, kawasan Balkan sedang dalam proses perjalanan untuk menjadi bagian

integral dari Eropa, dan Balkan harus didefinisikan sebagai sub-kompleks dari UE-RSC Eropa. Hal ini menyimpulkan bahwa dinamika keamanan Balkan berinteraksi dengan dinamika keamanan di seluruh Eropa. Reaksi Uni Eropa dan Russia sehubungan dengan sebelum dan pasca kemerdekaan Kosovo telah menghasilkan sejumlah interaksi kekuatan besar dalam dua kompleksitas keamanan wilayah yang terpisah namun berdampingan, yaitu EU-Eropa-RSC dan Post-Soviet-RSC. Hal ini dikarenakan proyeksi 2 (dua) kekuatan besar di wilayah yang berdekatan, yaitu UE dan Russia, sehingga menghasilkan dinamika keamanan antardaerah, yang merupakan indikasi untuk memperkuat keberlangsungan super-kompleksitas di keseluruhan Eropa. Dalam variabel *amity-enmity* penulis akan menganalisis pola hubungan antara EU dan Rusia. Pada akhirnya, penulis akan berusaha menilai *pola amity-enmity* seperti apakah yang terjadi di kompleks keamanan EU dan Rusia yang termanifestasi ke dalam kebijakan kedua negara.

Kebijakan Uni Eropa Dalam Konflik Kemerdekaan Kosovo Sebagai Jalan Pembuka Menuju Proses Integrasi di Kawasan Balkan

Dikenal luas sebagai salah satu aktor internasional, UE telah memainkan peranan penting dalam menentukan masa depan bagi Balkan. Kebijakan UE terhadap Balkan mencakup berbagai masalah, meskipun isu-isu utama berada di bawah Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama Uni Eropa (CFSP) dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (ESDP). Sepanjang sebagian besar sejarahnya, kawasan Balkan dikenal karena konflik, perang, kerusuhan, kediktatoran keras, dan jalur perkembangan yang buruk. Setelah peperangan pada tahun 1990-an sebagai akibat dari pecahnya Yugoslavia, tampaknya hal-hal telah menjadi lebih baik bagi kawasan ini. Ada beberapa argumen utama untuk menjelaskan hal tersebut, salah satunya adalah Balkan menginginkan integrasi UE.

Integrasi Eropa di Balkan Barat telah memberikan kerangka kerja yang efektif untuk rekonsiliasi, demokratisasi, dan revitalisasi sosial-ekonomi. Namun, pasca konflik, isu utama telah menghalangi kemajuan dalam bidang-bidang ini, yaitu nasionalisme laten di Serbia dan Status Kosovo yang belum terselesaikan. Sementara PBB ditugasi dengan tanggung jawab untuk mengelola provinsi, UE semakin berambisi untuk menentukan kondisi dan strategi dimana Kosovo akan tetap mempertahankan reformasi dan menciptakan sistem yang memiliki fungsi. Pada persimpangan kedua proses ini, yaitu penyelesaian status Kosovo dan misi integrasi Eropa di Balkan Barat, Uni Eropa memiliki kesempatan historis untuk menggunakan instrumen yang tersedia di dalam mengatalisasi transformasi Kosovo menjadi negara yang

lebih independen dan demokratis. Hal ini bertujuan untuk mencapai stabilitas keamanan di kawasan Eropa itu sendiri dan untuk membantu menghalau hambatan-hambatan di dalam integrasi Eropa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terselesaikan dan sisa-sisa etno-nasionalisme. Berdasarkan prinsip HAM dan Demokrasi dengan karakteristik UE, tujuan akhir dari intervensi dan integrasi diantaranya adalah untuk membangun semua struktur yang diperlukan untuk melakukan proses integrasi Eropa, sementara itu menyebarluaskan mekanisme integrasi kepada Kosovo. Hal yang tak kalah penting adalah untuk mengadopsi *Ahtisaari plan* sebelum konstitusi sebagai salah satu kondisi kemerdekaan yang disepakati secara internasional.

Krisis yang seringkali meningkat di Kosovo menegaskan bahwa Uni Eropa masih belum dapat mencegah, menahan, atau mengakhiri konflik kekerasan di dalam wilayahnya sendiri. Tepatnya pada bulan Maret tahun 1999 Dewan Eropa telah menekankan '*moral obligation*' UE untuk menanggapi konflik kemanusiaan yang terjadi di tengah Eropa (Shepherd, 2009). Namun, rupanya itu operasi yang dilancarkan NATO yang dipimpin oleh Amerika yang mengakhiri serangan tentara Serbia di Kosovo. *OAF*, dalam arti itu, pada akhirnya meyakinkan seluruh masyarakat UE untuk menghadapi harapan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan di dalam Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP).

Hasilnya adalah sebuah komitmen terhadap kebijakan dan kemampuan yang lebih baik untuk manajemen konflik agar lebih komprehensif, yang mampu bertindak baik sesuai peranannya baik di lingkungannya maupun di dunia internasional. Peran intensif semacam itu berarti akan meningkatkan sifat *hard power* dan *soft power* UE, dan dua inisiatif kebijakan yang paling signifikan dalam transformasi yang diluncurkan ini ketika *OAF* telah berakhir. Yang pertama, Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa (*ESDP*), berusaha untuk melengkapi kekuatan UE melalui pengembangan kemampuan militer (European Parliament, 2016). Oleh sebab itu, awalnya *ESDP* dianggap sebagai instrumen yang berpotensi bersifat koersif, namun hal ini segera menjadi sesuatu yang lebih berfokus pada manajemen konflik. Dengan demikian, *ESDP* telah dilengkapi oleh pengembangan dari kemampuan manajemen krisis sipil. Inisiatif kedua yang tak kalah penting adalah Stabilisasi dan Proses Asosiasi (*AP*), menambahkan kedua soft dan hard power dari UE dengan meningkatkan jangkauan instrumen ekonomi dan politik yang tersedia untuk mempromosikan stabilitas dan keamanan di lingkungan. Secara khusus, *SAP* memberikan dorongan yang sangat penting, yaitu prospek keanggotaan UE kepada negara-negara Balkan (European Commission, 2017).

ESDP kemudian diposisikan sebagai alat manajemen konflik yang akan mengatasi kekurangan yang diakui UE. Dewan Eropa Köln menghubungkan ESDP secara eksplisit pada ‘berbagai macam pencegahan konflik dan tugas-tugas manajemen krisis yang telah didefinisikan dalam Perjanjian Uni Eropa, Petersberg Tasks (Hopi, 2012). Perjanjian ini kemudian diintegrasikan oleh UE ke dalam Perjanjian Amsterdam di tahun 1999, termasuk tugas humaniter dan penyelamatan, tugas pemeliharaan dan tugas pasukan tempur di manajemen krisis, dan upaya perdamaian (Pagani, 1998).

Pada bulan Juni tahun 2004, Dewan Eropa menerbitkan rancangan resmi aspek sipil dari ESDP yang menggarisbawahi perlunya tujuan utama sipil, konferensi yang mempertanyakan kesanggupan berkomitmen dan perluasan keahlian yang tersedia untuk misi-misi potensial ESDP (termasuk para pakar HAM, kebijakan politik, reformasi sektor keamanan, mediasi, kontrol perbatasan, senjata, demobilisasi dan reintegrasi (Sari, 2008). Sisi kuantitatif dari persamaan sipil telah dipenuhi oleh konferensi komitmen pada bulan November tahun 2004. Dimana 5.761 polisi, 631 pakar pengaturan hukum, 562 ahli administrasi dan 4.988 personil perlindungan hukum yang telah dijanjikan. Kesanggupan ini sudah ditulis di atas kertas, memberi peran pengelolaan konflik yang lebih baik di seluruh spektrum konflik (Jakobsen, 2006).

Penguatan Terhadap Alat-Alat Integrasi Melalui Supremasi Hukum

Aspirasi dari Uni Eropa untuk menjadi aktor global penyedia kemandirian dan stabilitas, mungkin, paling signifikan terwujud di kawasan Balkan Barat, dimana UE telah meluncurkan keterlibatan eksternalnya yang paling luas, termasuk beberapa misi *CSDP*. Salah satu titik fokus keterlibatannya adalah proses kemerdekaan Kosovo, dengan misi *European Union Rule of Law Mission* (EULEX) yang telah menjadi label unggulan dari *CSDP*. Sejauh ini EULEX tidak hanya menjadi misi terbesar *CSDP*, namun juga menjadi misi yang kompleks, mahal, dan yang terpanjang di UE. Kita dapat menamakannya misi unggulan dari *CSDP*, baik dari aspek keuangan yang berdedikasi ataupun sumberdaya manusia, dan yang terakhir dari segi perspektif keputusan ambisius UE untuk melakukan hal yang sangat kompleks dan menantang. Pengakuan UE bahwa kemajuan supremasi hukum di Kosovo sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, serta perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang tercermin diseluruh upaya eksternal dan terutama terwujud melalui misi penyebaran aturan hukum yang luas.

Untuk keperluan perencanaan kontijensi lanjutan untuk penyebaran misi UE di wilayah Kosovo, UE membentuk Tim Perencanaan yang disebut (EUPT), yang dikerahkan ke Kosovo. Tim Perencanaan ditugaskan untuk menyiapkan faktor-faktor dasar untuk kemungkinan melakukan operasi manajemen krisis UE di bidang supremasi hukum dan kemungkinan area lain di Kosovo. EUPT memiliki peran penting dalam fase awal penempatan misi EULEX sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Pasal 4 dari Joint Action 2008/124/CFSP pada European Union Rule of Law Mission in Kosovo (The Council of The European Union, 2008). Menurut artikel tersebut, EUPT Kosovo ditunjuk untuk memimpin tahap perencanaan dan persiapan. EUPT telah bertanggung jawab atas perekrutan dan penempatan staf, peralatan dan layanan untuk EULEX pada tahap awal ketika misi belum mencapai kapasitas operasionalnya (Grilj & Zupančič, 2016). Hal ini bekerja di lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal dan mendiskusikan bentuk kerja sama dengan pihak berwenang setempat. Lebih jauh, EUPT berkontribusi pada perencanaan konsep operasi (CONOPS) dan rencana operasional (OPLAN) dan untuk mengembangkan instrumen teknis yang diperlukan untuk melaksanakan mandat EULEX (Council of The European Union , 2008).

Hingga pada akhirnya, mandat misi UE disepakati pada tanggal 4 Februari 2008, menugaskan EULEX dengan mendukung otoritas Kosovo. EULEX adalah misi kepolisian dan aturan hukum yang terintegrasi dengan tujuan untuk memperkuat supremasi hukum di Kosovo (Warbrick, 2008). UE memiliki peran dan tugas yang berbeda di Kosovo. Kosovo adalah negara kandidat potensial untuk akses UE dan dengan demikian menjadi bagian dari proses perluasan. Layanan Aksi External UE memfasilitasi juga memfasilitasi dialog antara Kosovo dan Serbia, oleh sebab itu posisi EULEX adalah netral. Tidak seperti misi sipil UE di masa lalu, misi EULEX memiliki otoritas eksekutif untuk kepolisian di beberapa wilayah, sehingga jumlah personelnya relatif besar (Weller, 2008). Mandat misi seperti yang sudah diramalkan di dalam dokumen Ahtisaari Plan, yaitu untuk menjalankan beberapa tugas tertentu, termasuk;

- monitoring, mentoring, dan advising (MMA) kepada pihak berwenang di Kosovo
- membalik atau membatalkan keputusan operasional dari pihak yang berwenang, bila perlu untuk mempertahankan supremasi hukum
- memastikan bahwa sistem peradilan bebas dari gangguan politik
- menyelidiki atau membantu penyelidikan terkait khusus kejahatan perang, terorisme, kejahatan terorganisir, korupsi, dan kejahatan serius lainnya.

- meningkatkan koordinasi dan kerja sama pemerintahan Kosovo terhadap otoritas hukum
- melawan korupsi.

Keputusan untuk meluncurkan misi sipil harus diambil dalam waktu 5 (lima) hari setelah Dewan menyetujui Konsep Manajemen Krisis, dan kemampuan itu harus dikerahkan dalam waktu 30 hari sejak keputusan untuk meluncurkan misi. Fokus pada penggelaran cepat ini mengarah pada pengembangan Tim Tanggap Sipil, yang terdiri dari sekelompok ahli yang terintegrasi untuk membuat penilaian pencari fakta dalam krisis atau krisis yang akan segera terjadi, menyediakan inisiasi operasi cepat tanggap, dan memperkuat mekanisme EU yang ada untuk manajemen krisis (House of Commons, 2008). Kemampuan sipil ini pertama kali digunakan di Balkan Barat, akan tetapi telah diterapkan di berbagai belahan dunia. Dengan demikian kemampuan UE yang dikembangkan sebagai tanggapan terhadap konflik Kosovo adalah bagian dari transformasi luas bagi UE dalam perannya di internasional. Misi EULEX harus dilihat sebagai bukti terbaik bahwa UE mampu memberikan kontribusi nyata pada dimensi sipil dan stabilisasi dan rekonstruksi pasca konflik. Dari perspektif politik-strategis, EULEX didirikan sebagai bagian dari upaya UE yang lebih luas untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Balkan Barat dan untuk mendukung pihak berwenang Kosovo ketika mereka melakukan reformasi yang dianggap perlu di jalan menuju integrasi Eropa.

Kebijakan Luar Negeri Rusia di Kawasan Balkan Dalam Konteks Penentangannya Terhadap Kemerdekaan Kosovo.

Dalam kebanyakan analisis Barat tentang wilayah bekas Soviet, situasinya disajikan sebagai anomali karena hubungan asimetris yang terlihat mencolok. Sub-bab ini akan dibuka dengan tulisan singkat terkait lintasan sejarah dari Rusia dan negara-negara yang memiliki sejarah penting tentang negaranya. Bagian pertama dengan memeriksa dinamika keamanan karena mereka telah berevolusi dari wilayah itu pasca pembubaran Uni Soviet hingga hari ini, dalam tingkat domestik, regional, antar-regional, dan global (Buzan & Wæver, 2003). Dalam hal ini dipengaruhi oleh variasi diantara 4 (empat) sub-wilayah yang berbeda, yaitu negara-negara Baltik, negara-negara bagian Barat, Kaukasus, dan Asia Tengah. Untuk sebagian besar, masalah keamanan yang sebagian besar terkait dengan negara bagian lain dalam sub-kompleks Rusia (Andžāns, 2014). Yang telah menentukan RSC lebih luas, mengelompokkan mereka semua, adalah faktor pemersatu, pertama, Rusia dan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (PNM) dan yang kedua, bahwa sebuah koalisi yang berusaha untuk mengendalikan Rusia mau

tidak mau harus melintasi wilayah tersebut. Faktor terumit di dalam divisi ini adalah peran Eropa di dalam perjuangan identitas Rusia (Troitskiy, 2015). Meskipun secara historis Eropa memainkan peran ini dalam perdebatan Rusia tentang diri mereka sendiri, arena global saat ini jauh lebih penting daripada Eropa dalam upaya Rusia baik untuk melindungi peran yang lebih luas di luar wilayah dan untuk melegitimasi kerajaan regionalnya.

RSC dengan jelas berpusat kepada kekuatan besar. Rusia hingga saat ini adalah negara adidaya, dan masih menjadi negara yang memiliki kekuatan besar itu. Adapun Rusia juga bertetangga dengan kedua *RSC* lainnya yang memiliki/mengandung kekuatan besar, yaitu Uni Eropa- Eropa yang berpusat di Uni Eropa dan kompleks kekuatan besar Asia dengan China dan Jepang- dan satu kompleks standar Timur Tengah (Samokhvalov, 2018). Pada tahun 1991, merupakan awal mula perubahan *RSC* Rusia. Rusia tidak memiliki masalah keamanan domestik pada tingkat yang sama, akan tetapi tingkat domestiknya tetaplah penting untuk memahami kondisi keamanan kawasan. Di wilayah yang terpusat, faktor-faktor yang mendorong kebijakan luar negeri dari kekuatan regional jelas sangat penting. Kebijakan Rusia berubah secara signifikan setelah 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun pasca Soviet (Nikitin, June).

Balkan memiliki posisi geografis yang luar biasa, menyajikan hubungan antara Eropa dan Asia, antara Eropa Tengah dan Timur Tengah, dan Kekaisaran Romawi Timur dan Barat. Wilayah ini telah menarik kekuatan regional dan global di dalam mewujudkan kepentingan mereka dan memperluasnya ke wilayah lain. Balkan memainkan peranan penting untuk merealisasikan kepentingan geopolitik Rusia. Setelah periode stagnasi, negara ini telah kehilangan pengaruh di Balkan dikarenakan keadaan sejarah dan faktor-faktor politik kontemporer, Rusia telah dan tetap menjadi salah satu tokoh kunci di papan catur Balkan. Juga benar, bahwa setelah kehancuran Uni Soviet, Rusia yang baru, pewaris Kekaisaran Rusia, telah kehilangan sebagian besar kekuasaannya untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara Balkan. Akibatnya, negara-negara ini melihat peran Rusia dari posisi yang berbeda. Sebagian besar mantan negara-negara yang tergabung ke dalam ‘persaudaraan sosialis’ bekerja sama dengan Uni Eropa & NATO.

Dominasi dan Eksklusifitas Sebagai Manifestasi Kebijakan Geopolitik Dalam Mendapatkan Peranannya Kembali.

Bermain kekuatan besar, atau aliansi politik militer, melawan satu sama lain adalah tradisi panjang Belgrade. Strategi ini juga merupakan hasil dari posisi geopolitik dan strategis Serbia dan dengan demikian juga dari Yugoslavia. Terlebih, ketika hal ini terjadi,

memprovokasi konflik antar Rusia dan NATO adalah satu-satunya opsi politik untuk bertahan hidup yang terbuka bagi mantan Presiden FRY dan rezimnya (Romanenko, 2000). Hingga pada akhirnya Rusia membantu rezim Milosevic untuk bertahan lebih lama. Peran penting dalam semua ini dimainkan oleh kontak “personal” dan hubungan antara politik Serbia dan Rusia dan lingkaran ekonomi. Dengan sedikit pengecualian, tidak ada satupun politisi Rusia, bahkan bagi mereka yang berorientasi demokratis maju dengan pengingkaran langsung terhadap rezim Slobodan Milosevic dan rezimnya. Hal ini juga menjelaskan hasil pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada tanggal 26 Maret tahun 1999, ketika Rusia mengajukan resolusi yang menuntut diakhirinya serangan udara terhadap Yugoslavia dan hanya memperoleh 3 dari 15 suara anggota (Smith & Plater-Zyberk, 1999). Pada saat yang sama, Duma Rusia, begitu juga dengan Partai Liberal Demokrat Rusia, dengan suara bulat mengecam tindakan NATO (Yesson, 2000).

Hasil riset opini publik menegaskan bahwa terdapat konsensus permanent di Rusia yang menentang keterlibatannya melawan Barat-UE dan NATO. Dengan kata lain, ada perbedaan besar antara mood struktur politik dan penduduk. Mengingat situasi ini, hasil yang sangat negatif dari kebijakan Rusia hanya satu-satunya yang diharapkan. Pada awalnya, Barat-UE tidak memasukan Rusia dalam pertimbangannya, baik karena kepentingan mereka yang jelas bertentangan dan karena dukungan yang diberikan oleh politisi Rusia terhadap usaha Milosevic tidak dapat diterima sebagai alternatif untuk tindakan militer (Romanenko, 2000). Tidak dapat dipungkiri, terlepas dari pernyataan publik Presiden Yeltsin, “Kami tidak akan menyerah terhadap Kosovo tanpa perlawanan!”. Serangan udara terhadap Yugoslavia terus berlanjut tanpa menghiraukan kecaman resmi Moskow atas “agresi NATO” dan pernyataan serupa (Brovkin, 1999). Menurut ilmuwan politik Rusia dan anggota Duma A, Arbatov, menyusul ledakan perasaan anti-Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejauh perdebatan di Rusia menginginkan /menyarankan pengiriman senjata di Yugoslavia sebagai korban agresi. Tentu saja ini akan menyiratkan konfrontasi militer terhadap NATO, atau menggunakan semua sarana politik yang tersedia untuk menekan Barat (Arbatova, 2008).

Bagi masyarakat Rusia, Kosovo menunjukkan bahwa suatu bangsa akan dianggap serius di komunitas dunia sejauh dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendapatkan rasa hormat. Rusia menyimpulkan bahwa mereka harus fokus dalam jangka waktu yang cukup panjang untuk memulihkan status kekuasaan mereka dan bahwa meskipun dalam kesulitan ekonomi, Federasi Rusia harus mengarahkan perhatiannya terhadap peningkatan kapasitas militer dan pertahanannya. Lebih lanjut, Rusia tidak hanya harus mempersiapkan kemungkinan

konfrontasi di masa mendatang terhadap NATO, tetapi masyarakat Rusia juga akan menyimpulkan bahwa banyak negara diintimidasi oleh kekuatan NATO yang begitu luar biasa dan canggih terhadap sebuah negara yang kecil, akan diminta untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri terhadap intervensi Barat/NATO di masa depan (NATO, 2001). Dengan demikian, Rusia akan mengantisipasi bahwa krisis Kosovo hanya akan mendorong negera-negara dalam posisi inferioritas strategis di seluruh komunitas dunia untuk melipatgandakan upaya mereka agar memperoleh persenjataan canggih.

Pada tanggal 17 February tahun 2008, ketika Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya untuk kedua kalinya, acara tersebut menandai episode terbaru dalam pemotongan bekas Yugoslavia. Tidak seperti yang terjadi pada tahun 1991, negara yang baru dibentuk itu segera diakui oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Turki, dan banyak negara lainnya, sementara Rusia bersekutu dengan Serbia untuk menentang kemerdekaannya (Krystman & Żakowska, 2015). Pandangan resmi Rusia tentang situasinya adalah bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo bertentangan dengan hukum internasional. Bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo telah melanggar kedaulatan Republik Serbia, Piagam Persarikatan Bangsa-Bangsa, UNSCR 1244, prinsip-prinsip Helsinki Final Act, kerangka konstitusi Kosovo dan perjanjian Contact Group tingkat tinggi dan peringatan komunitas internasional mengenai resiko peningkatan ketegangan dan kekerasan antar etnis di provinsi ini dan konflik baru di Balkan (Pacer, 2015). Serbia dan Rusia berpendapat bahwa resolusi 1244 tidak akan memungkinkan pemisahan Kosovo tanpa persetujuan Serbia. Secara khusus, mereka mengacu kepada bahasa yang tertulis di preambular dari resolusi, “menegaskan kembali komitmen semua negara anggota terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Republik Federal Yugoslavia.

Intepretasi Preseden Negatif Kemerdekaan Kosovo bagi Kepentingan Strategis Rusia di Balkan.

Di luar warisan sejarah, kebijakan Rusia terhadap Kosovo merupakan fungsi dari kepentingannya yang kompleks dan sering bertentangan, domestik dan regional, yang mana akan dipengaruhi oleh keputusan tentang kemerdekaan, terutama yang diambil dan dilaksanakan tanpa persetujuan pihak Serbia. Pemerintah Rusia telah menyatakan keprihatinan bahwa kemerdekaan Kosovo akan menjadi preseden bagi era pasca-Soviet-untuk wilayahnya-daripada republik- untuk melepaskan diri dari sebuah negara, membuka kotak Pandora untuk negara dan wilayah yang lebih kecil untuk diikuti. Dibalik ketakutan yang sederhana atas integritas teritorial, pandangan Moskow adalah bahwa tidak dapat diterima untuk mengabaikan

posisi Serbia tanpa menetapkan preseden yang lebih lanjut. Hukum internasional, termasuk Akta Final Helsinki, mengakui tidak dapat diganggu gugatnya sebuah batas negara (Steinberg, 2009). Menurut norma-norma yang ada, setiap pemisahan harus disetujui oleh negara yang bagian negaranya terpisah. Menurut Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, bahkan jika resolusi PBB secara eksplisit menyatakan bahwa Kosovo bukan merupakan preseden, hal itu akan dilihat oleh sekelompok separatis dan digunakan untuk mendukung penyebabnya (Weller, 2008).

Oleh sebab itu Rusia terus mendesak negosiasi antara Beograd dan Prishtina dan secara konsisten menentang segala bentuk pemaksaan solusi kepada Serbia. Sejumlah pertemuan telah diadakan antara Putin dan Pemimpin Serbia; Putin bertemu dengan Perdana Menteri Vojislav Kostunica sehari setelah pertemuan G8. Putin kemungkinan besar hanya menyatakan dukungannya untuk posisi Serbia daripada datang dengan alternatif praktis untuk membuka negosiasi yang berakhir. Tampaknya desakan Rusia pada kelanjutan negosiasi adalah cara untuk mempertahankan status quo dari kemerdekaan *de facto*, sementara resolusi hukum formal tanpa batas (Hughes, 2013). Situasi seperti ini tidak dapat diterima untuk Kosovo, UE atau Serbia. UE meningkatkan tanggungjawabnya kepada Balkan dan memikirkan upaya lebih lanjut dalam perluasannya. Satu lagi preseden yang ditakuti Moskow adalah memberikan Kosovo kemerdekaan sebelum memenuhi komitmennya untuk menjamin keamanan dan mempromosikan hak asasi manusia bagi minoritas Serbia, termasuk kembalinya pengungsi, di bawah Resolusi 1244. Moskow berpendapat bahwa pemberian kemerdekaan sebelum standar-standar di atas terpenuhi sama saja akan menyetujui/membiarkan bahkan menghargai adanya pembersihan etnis, dan dapat mendorong penolakan serupa untuk menghormati komitmen oleh pihak lain dalam konflik di Timur Tengah atau Eurasia. Untuk menggarisbawahi keprihatinan ini, Moskow memulai perjalanan pencarian fakta khusus oleh para Duta Besar dari negara-negara anggota Dewan Keamanan ke Kosovo dan mengesakan laporan khusus di bawah bantuan PBB untuk memeriksa bagaimana resolusi 1244 sedang dilaksanakan di lapangan (Antonenko, 2007).

Terdapat bentuk lain dari preseden Kosovo bahwa Moskow mungkin tergoda untuk menggunakan keuntungannya. Ini melibatkan klaim kemerdekaan oleh separatis atau secara *de facto*, entitas yang tidak diakui di bekas Uni Soviet, termasuk Ossetia Selatan dan Abkhaiza di Georgia dan Transnistria di Moldova. Pada KTT G8, Putin mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa prinsip-prinsip universal harus diterapkan untuk memberikan negara (apapun) hak penentuan nasib sendiri, “baik itu di Balkan ataupun di Kaukasus pasca-Soviet....saya tidak melihat perbedaan antara (Kosovo) dan (negara separatis pasca-Soviet). Dalam kedua situasi

kasus saat ini adalah hasil dari runtuhnya Kekaisaran Komunis. Dalam kedua kasus kami memiliki konflik antaretnis, dalam kedua kasus, konflik ini mempunyai akar sejarah yang panjang dan kejahatan telah dilakukan. Dalam kedua kasus ada struktur *quasi state de facto* yang independen” (Kumar, 2008). Moskow telah lama mendukung negara-negara de-facto di Eurasia, menawarkan mereka dukungan politik dengan mengeluarkan paspor Rusia kepada mayoritas penduduk Abkhazia dan Ossetia Selatan, bantuan ekonomi langsung, bantuan militer, dan dorongan ambisi mereka untuk merdeka. Moskow bersikeras memainkan peran mediator dalam konflik-konflik ini, meskipun keduanya Georgia dan Moldova melihat Rusia sebagai pihak dari konflik ini daripada kekuatan independen. Sedangkan Amerika dan UE, di sisi lain, sangat berkomitmen untuk mendukung integritas wilayah Georgia dan Moldova. Pernyataan Rusia bahwa kemerdekaan Kosovo akan menentukan preseden bagi negara-negara de facto Eurasia dan melegitimasi klaim mereka sendiri terhadap kemerdekaan telah ditolak keras oleh Barat, yang berpendapat bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan sendirinya.

Kesimpulan

Perspektif Security Complex menganalisa bahwa Reaksi Uni Eropa dan Russia sehubungan dengan sebelum dan pasca kemerdekaan Kosovo telah menghasilkan sejumlah interaksi kekuatan besar dalam dua kompleksitas keamanan wilayah yang terpisah namun berdampingan, yaitu EU-Eropa-RSC dan Post-Soviet-RSC. Hal ini dikarenakan proyeksi 2 (dua) kekuatan besar di wilayah yang berdekatan, yaitu UE dan Rusia, sehingga menghasilkan dinamika keamanan antardaerah, yang merupakan indikasi untuk memperkuat keberlangsungan super-kompleksitas di keseluruhan Eropa. Dalam permasalahan yang menyangkut amity-enmity kita dapat merangkumnya menjadi 3 kategori besar diantaranya adalah; konflik tipe kompleks, yang dicirikan oleh hubungan permusuhan, dengan kemungkinan konflik akan terus meningkat; kompleks dimana terdapat tingkat permusuhan rendah, khususnya untuk rezim keamanan; dan yang ketiga didasarkan kepada pola amity, yang membentuk komunitas keamanan. Menilik dari adanya pertentangan kepentingan antara EU dan Rusia, terlihat jelas bahwa pola hubungan lebih mengarah pada enmity, daripada amity. EU berpandangan bahwa ia harus turun di konflik Kosovo ini guna melancarkan rencana integrasi terhadap negara- negara Balkan yang telah diusungnya sejak lama, sedangkan bagi Rusia, kemerdekaan Kosovo merupakan hal yang salah di mata hukum internasional. Terlebih, Rusia akan mengalami kerugian yang cukup besar karena kawasan Balkan Barat merupakan kawasan yang penting bagi seluruh aspek Rusia, termasuk Kosovo didalamnya.

REFERENSI

Buku :

- Buzan, B. (1991). *People, States and Fear Second Edition, An Agenda For International Security Studies In The Post-Cold War Era*. Colorado: Lynne Rienner.
- Buzan, B., & Wæver, O. (2003). *Regions and Powers : The Structure of International Security*. New York: United States of America by Cambridge University Press.
- McSweeney, B. (1999). *Identity and Interests : A Sociology of International Relations* . United Kingdom: Cambridge University Press.
- Pace, M. (2004). Governing border conflicts: when can the European Union. *ECPR Joint Session Workshops* (p. 10). Uppsala: University of Birmingham.
- Sylvia, D., & Sudirman, A. (2010). *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Punch, K. F. (2005). *Introduction to Social Research—Quantitative & Qualitative* . London: SAGE Publications.
- Pacer, V. (2015). *Russian Foreign Policy under Dmitry Medvedev, 2008-2012 BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies*. New York: Routledge.

Jurnal :

- Antonenko, O. (2007). Russia and the Deadlock Over Kosovo. *Russia/NIS Center*, 14.
- Krystman, A. N., & Żakowska, M. (2015). Conflict in Kosovo through the Conceptual Framework of Stakeholders. *Connections Vol. 14, No. 4 (Fall 2015)*, pp. 69-82, 6.
- Nurhayati, & Santosa. (2001). The Threat on Disintegration of Indonesia: A Lesson from Yugoslavia Experience. *Sosiohumanika XIV, No.3*, 562.
- Setyawati, S. M., & Agussalim, D. (2015). Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 19, Nomor 2, November 2015*, 113.
- Warbrick, C. (2008). Kosovo: The Declaration of Independence. *The International and Comparative Law Quarterly Vol. 57, No. 3 (Jul., 2008)*, pp. 675-690, 681.
- Winn, N. (2003). CFSP, ESDP, and the Future of European Security: Whither NATO? *The Brown Journal of World Affairs Vol. 9, No. 2 (Winter/Spring 2003)*, pp. 149-160, 4.

Website :

- Fearon, J. D. (2016, Agustus). *Ethnic War As a Commitment Problem*. Retrieved from web.stanford.edu: <https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Ethnic-War-as-a-Commitment-Problem.pdf>
- Onwar. (2018, Maret 1). *Onwar*. Retrieved from Onwar: <https://www.onwar.com/aced/chrono/index1990.htm>

